

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
KEMENDIKBUD NO 14 TAHUN 2018 TENTANG ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

(Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

DELVA JARIAH

NPM. 1521020203

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H /2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
KEMENDIKBUD NO 14 TAHUN 2018 TENTANG ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

(Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
Pembimbing II : Badruzamman, S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H /2019 M

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah yang terbilang controversial adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Yang didalamnya turut mengatur mengenai system zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru dengan menerapkan system zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan peraturan Kemendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA negeri 2 Bandar Lampung? (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap peraturan Kemendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana problem dan diperbaruainya peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru melalui system zonasi.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian dianalisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Penetapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tujuan dari system zonasi ini adalah agar anak-anak dapat bersekolah di tempat yang dekat dari domisilinya serta pemerataan agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit, sehingga anak-anak yang dianggap sebagai anak pintar hanya akan masuk sekolah favorit saja. Anak yang satu wilayah dengan sekolah lebih besar kemungkinan akan diterima di sekolah tersebut. Zonasi tidak hanya untuk pemerataan sekolah favorit saja, melainkan juga sarana dan prasarana sekolah dan penyebaran guru yang berkualitas, apabila guru tersebut memiliki potensi ia akan berkembang di sekolah. Menurut peneliti, sistem zonasi yang dilakukan pemerintah sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam sesuai hanya saja harus disempurnakan kembali. Sebab keadilan dalam system zonasi ini membuat semua orang berhak mengamban pendidikan ditempat yang layak.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delva Jariah
NPM : 1521020203
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kemendikbud No. 14 Tahun 2018 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2019
Penulis,

Delva Jariah
1521020203

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, (alm) Adi Warman dan Ibu Arsida, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Kakakku tercinta Muhammad Ardiansyah, Dede Oktario, dan Febri Sofyanti, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
4. Alamamater tercinta



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Delva Jariah

NPM : 1521020203

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

PERATURAN KEMENDIKBUD NO 14

TAHUN 2018 TENTANG ZONASI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M.

NIP. 195703051978031001

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag. M.H.I.

NIP. 196806241997031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. H. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN KEMENDIKBUD NO. 14 TAHUN 2018 TENTANG ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU** (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung) Disusun oleh **Delva Jariah NPM 1521020203** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin/11 November 2019**, di lokal 20.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji II : Badurzamman, S.Ag., M.H.I.



Dr. L. Kurniadin, Tahmid, M.H.

NID 10610221993031002

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Delva Jariah putri keempat dari pasangan Bapak Adi Warman dan Ibu Arsida lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 04 Desember 1997. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Taman Kanak-kanak Al-Amin Rawa Laut pada tahun 2001 dan selesai Tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pahoman pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai Tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai Tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung, mengambil program studi Siyasah (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kemendikbud No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada progam strata (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Frenki, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M. selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk dalam diperguruan tinggi ini.
7. Kedua Orang Tuaku (alm) Bapak Adi Warman dan Ibu Arsida. Yang memberikan dukungan secara moril maupun materil.
8. Ketiga kakakku Udo Iyan, Abang Iyo, dan Uwo Ebi yang selalu memberikan dukungan.
9. Keluarga Besar Kakek dan Nenekku yang selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabatku Ade Elendris, Deviana Putri, M. Iqbal, Nurul Alifia, dan Tri Maulidiah yang selalu memberi Semangat dan Dukungan .
11. Sahabat-sahabat saya Ela Nofita, Permata Septa, Popi Markuri, dan Misra Aini Yang Telah Membantu Dan Selalu Ada Disaat Saya membutuhkan.
12. Teman-Teman Siyasah C yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

13. Teman KKN Kelompok 157 Adi, Albet, Bagus, Binti, Erna, Fitri, Fadli, Maya, Putri, Sinta, Syukron, dan Zulaifah. Keluarga Mbah, Bude dan Warga desa Banjar Negeri.
14. Teman-teman Kampung Nagrek.
15. Rekan-rekan mahasiswa
16. Teman-teman di Seluruh kost-kostan yang pernah ku singgahi terimakasih telah memberiku izin berteduh.
17. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun saya terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Delva Jariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zonasi	14
B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi	18
C. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan	19
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara	20
E. Hak dan Kewajiban Orang Tua	24
F. Hak dan Kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah	27
G. Pengertian Karakteristik, dan Jenis-jenis Perekembangan Peserta Didik	38
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang SMA Negeri 2 Bandar Lampung...	46
1. Sejarah Singkat.....	46
2. Tujuan.....	48
3. Visi	50
4. Misi	50
5. Tujuan.....	51

6. Sarana dan Prasarana Sekolah	53
B. Pelaksanaan Permendikbud No 14 Tahun 2018 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung	55
C. Data Peserta Didik Baru Tahun 2018 yang Sudah Diterima di SMA Negeri 2 Bandar Lampung	73
D. Batas wilayah SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan sekolah- sekolah yang termasuk di dalam wilayah.....	75

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendikbud No. 14 Tahun 2018.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN KEMENDIKBUD NO. 14 TAHUN 2018 TENTANG ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 adalah suatu peraturan tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.³
4. Kemendikbud yaitu singkatan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah kementrian dalam Pemerintahan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

³ *Permendikbud No. 14 tahun 2018*

Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.⁴

5. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian. Sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan; perzonaan.⁵

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah diatas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan terhadap ketetapan hukum islam mengenai peraturan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi yang terdapat dalam undang-undang.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kemendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru

1. Alasan Objektif

Karena telah terbentuk suatu ketetapan penerimaan peserta didik baru berupa zonasi di sekolah-sekolah yang dapat menimbulkan siswa/siswi tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah favorit yang mereka inginkan.

2. Alasan Subjektif

Bahasan ini menarik untuk dikaji dan sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dipelajari oleh penulis, serta pembahasan ini diangkat

⁴Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, op.cit. h.1572

dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini dalam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut Jhon Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa pencipta sebagai hak yang dikodrati. Dalam pasal 1 Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan hakekat martabat manusia.”⁶

HAM juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu HAM wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama dan pemerintah. Sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas HAM dan kebesarannya.⁷

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalm pasal 31 ayat(1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap warga Negara

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999

⁷ Candra Perbawati, “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektf Hukum Islam”, Al-‘Adalah, Vol. XII No. 4, 2018, hl. 1-2

berhak mendapatkan pendidikan”.⁸ Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 dikatakan: “pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”.⁹

Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya.¹⁰ Pendidikan merupakan bagian internal dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa.

Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu system pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia membentuk hidupnya

⁸Pasal 31 ayat(1) Undang Undang Dasar 1945

⁹Dr. M. Sukardjo, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 14

¹⁰Drs. Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hl.45-46

sesuai dengan ajaran Islam.¹¹ Pendidikan merupakan proses perstuan pencapaian tingkat keimanan dan berilmu (QS. Al-Mujadillah 58:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ

انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pemahaman system pendidikan. Perbaikan system pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas.

¹¹ Dr. H. Sofyan M Soleh dkk, *Revitalisasi Matakuliah Filsafat Pendidikan Islam* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2016), hl. 64

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya.¹²

Salah satu kebijakan pemerintah yang terbilang kontroversial adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Yang didalamnya turut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Diketahui pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung sistem zonasi ditentukan dengan jarak $\pm 8\text{KM}$ dengan batas wilayah Tanjung Karang Pusat. Selain SMAN 2, wilayah tersebut meliputi SMAN 1, SMAN 3, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 16. Teluk Betung Utara meliputi SMAN 3, SMAN 4, SMAN 8, SMAN 10, SMAN 11. Enggal meliputi SMAN 1, 3 SMAN.

¹²H.M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) h.29

Tanjung Karang Timur meliputi SMAN 1, SMAN 7. Dan Teluk Betung Selatan meliputi SMAN 4, SMAN 6, SMAN 8, SMAN 11. Kemudian, SMA Negeri 2 sendiri menerima 9 rombongan belajar untuk jurusan IPA dengan 288 siswa. Sedangkan 3 rombongan belajar untuk jurusan IPS dengan 96 siswa.

Peringkat sistem zonasi didasarkan pada jumlah Nilai UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pesil) jika jumlah pendaftar melebihi jumlah daya tampung satuan pendidikan, sedangkan sistem non zonasi pemeringkatan didasarkan skor piagam prestasi atau ketentuan lain. Bila terjadi beberapa siswa memiliki nilai yang sama baik sistem zonasi maupun sistem non zonasi, maka urutan peringkat berdasarkan urutan besaran nilai mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA), dan apa bila masih terdapat nilai yang sama didasarkan pada usia yang lebih tua.¹³

Nilai batas minimal SMA di Bandar Lampung untuk siswa reguler yaitu mulai dari 178,0 - 384,0 sedangkan siswa prestasi mulai dari 225,0 – 400,0. Di SMA Negeri 2 Bandar Lampung nilai batas minimal 333,0 untuk kelas reguler, 300,0 untuk kelas prestasi.¹⁴

Masyarakat justru dibuat bingung mengenai penerapan sistem ini. Berbagai permasalahan pun muncul, diantaranya faktor wilayah dengan presentasi 90% dari kuota siswa yang diterima dianggap mengesampingkan faktor prestasi karena prestasi sendiri maksimal 5%. Sehingga banyak anak

¹³<https://www.smp-muh5bdl.sch.id/2018/05/informasi-ppdb-sma-kota-bandar-lampung.html>

¹⁴<https://blog.kartunmania.com/2018/02/passing-grade-hasil-ppdb-smp-sma-dan-smk-kota-bandar-lampung-2017/#tabs-4716-0-1>

yang memiliki kemampuan diatas rata-rata tidak dapat bersekolah di sekolah yang ia impikan. Tak hanya itu, masyarakat beranggapan bahwasanya Permendikbud ini melanggar Hak Asasi Manusia karena dinilai melanggar hak-hak anak untuk sekolah di sekolah favorit yang mereka inginkan, khususnya pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.” Sehingga tak akan ada lagi korban jiwa seperti yang terjadi di kota Blitar, Jawa Timur. Siswa SMP yang bunuh diri dikarenakan tidak diterima di sekolah yang dia inginkan di karenakan adanya system zonasi.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraturan Kemendikbud No. 14 Tahun 2018 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung) .

D. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Kemendikbud no. 14 Tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan Kemendikbud no. 14 Tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan Kemendikbud no. 14 tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan Kemendikbud no. 14 tahun 2018 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam penerimaan peserta didik baru yang menzonasi.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk

memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹⁶ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁷ Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Tori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995) h

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h.9

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 15.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada respondes.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tetang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti

¹⁸ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 143

menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab, Skripsi, dan literature-literatu lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengeumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara.

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada rsponden yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru-guru, Siswa-siswi, serta pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

4. Populasi dan Sample

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun populasi dalam penilitian ini hanya terdapat 24 sekolah yang sesuai dari jumlah

sekolah sebanyak 126 sekolah jenjang SMA sederajat yang ada dikota Bandar Lampung.

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar perkiraan maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

- b. Sample adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁹ Penentuan sample dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sample dengan mengambil responden tertentu yang menjadi penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.²⁰ Sample yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh populasi pihak sekolah, dan yang berkepentingan.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literature yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analaisis yang digunakan adalah

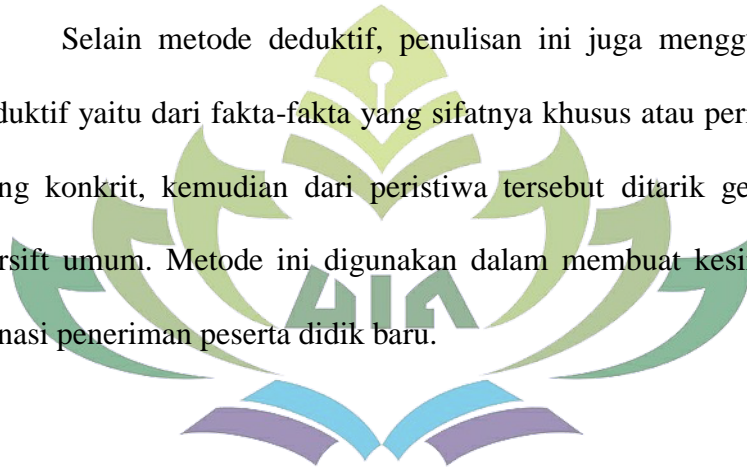
¹⁹ Sugiono, *metode penelitian bisnis*, cetakan ke 14, alfabeta, Bandung. 2009, hl.389

²⁰ *Ibid*, hl. 392

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian khusus.

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang zonasi penerimaan peserta didik baru.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem Zonasi

System zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah secara keseluruhan system zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). System zonasi mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam system PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. System zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan system Bina Lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota system zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.¹

Pada pelaksanaan seleksi PPDB ada sekolah yang mengutamakan zonasi dan ada yang mengutamakan nilai. Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 dan 16 Permendikbud 18 tahun 2018. Keterangan domisili di buktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Adapula isi dari Permendikbud No. 14 Tahun 2018 pasal 15 dan 16 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru yaitu:

¹ Eka Reza Khadowmi, Skripsi: "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta didik Baru Kabupaten Lampung Tengah" (Bandar Lampung: UNILA, 2019), h. 36

Sistem Zonasi

Pasal 15

1. Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Pasal 16

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut berdasarkan:
4. Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
5. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

6. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
7. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
8. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menerima calon peserta didik melalui:
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau bencana alam/social, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.²

Adapula tujuan dari system zonasi tersebut antara lain:

1. Pemerataan kualitas pendidikan

Zonasi adalah suatu kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. Kemendikbud memfokuskan zonasi d daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas. Zonasi bukan hanya untuk PPDB, melaikan juga untuk keseluruhan

² *Permendikbud Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018*

program yang tujuan utamanya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, maupun pendidikan masyarakat.

2. Menciptakan banyak sekolah favorit

Dengan kebijakan baru ini diharapkan sekolah favorit ada di setiap zonasi, bukan hanya di tempat-tempat tertentu.

3. Peningkatan kualitas guru

Diperlukan program intervensi. Intervensi dalam bentuk program peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana, perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan kesiswaan, dan lain-lain.³

Ketentuan dalam system zonasi:

1. Didalam system zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di

³ <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb> , diakses pada 31 juli 2019, jam 10:46 wib

daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tapung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk proses penerimaan calon peserta didik yang berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima. Adapun calon peserta didik yang melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yang akan diterima. Artinya system zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi

Kelebihan system zonasi menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan.⁴

Adapun kekurangannya banyak yang menilai bahwa system zonasi ini tidaklah tepat lantaran menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan.

⁴Dian Purwanti dkk, “efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol 5 no 4, 2018, h.1

C. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu:⁵

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada prinsip ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya di peruntukan untuk golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai yaitu hak asasi, agama, kultural dan kemajemukan. Terlihat bahwa pendidikan sangat menentang terhadap hal yang berhubungan dengan membeda-bedakan atau mengotak-kotakan masyarakat. Baik suku manapun, agama apapun, warna kulit apapun berhak memperoleh pendidikan dengan baik.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan system terbuka dan multimakna.
 - a. Pendidikan system terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.
 - b. Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 , (Yogyakarta: Bening, 2010) h.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu: tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seseorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggungjawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga

negara. Apabila seorang warga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka warga negara tersebut menjalankan suatu peranan, istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁶

Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam mengaplikasikan dan menegakkan hak serta kewajiban tersebut.⁸

⁶ Johan Yasin, "*hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga Negara dalam hukum positif Indonesia*", Jurnal Syiar Hukum, vol 11 no. 2, 2009, h. 7

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada, 1990) h. 269.

Hak dan Kewajiban Warga negara diatur dalam Bab IV pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu:⁹

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara terpendek atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpendek berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selain diatur dalam Bab IV pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, hak dan kewajiban warga negara juga terdapat didalam Undang-undang Dasar 1945 yang diantaranya: ¹⁰

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Hak dalam upaya pembelaan Negara.
4. Hak berserikat dan berkumpul.
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk kritik.
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

⁹ Undang-undang no. 20 tahun 2003, h. 19

¹⁰ *Op.cit*, Johan Yasin, h. 11-13

7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
8. Hak mendapat pengajaran.
9. Hak fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat 1 Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)
- b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
- c. Hak untuk dipilih sebagai wakil MPR maupun DPR/DPRD;
- d. Hak untuk berusaha;
- e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
- f. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- g. Hak memilih tempat tinggal;
- h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan dan pemerintah;
- j. Hak untuk memanfaatkan sarana umum;
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyalahgunaan;

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain:

- a. Menjunjung hukum dan pemerintahan
- b. Turut serta dalam upaya pembelaan Negara

- c. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Disamping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti:

- a. Membayar pajak
- b. Menghargai warga negara
- c. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum
- d. Memelihara kelestarian lingkungan
- e. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
- f. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum.

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut:

- 1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
- 2. Penyelenggara negara
- 3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

E. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak,¹¹ pendidikan orang tua lebih menekankan

¹¹Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT. Bina Ilmu, 2004), h. 131

pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya berdasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, adapula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggara pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Imam Al-Ghazali, proses pendidikan terhadap anak merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan merupakan amanat Allah SWT bagi kedua orang tua. Karena itu orang tua yang sangat memiliki kedekatan biologis dan juga kedekatan psikologis sangat besar andil dan pengaruhnya dalam pembentukan pendidikan anak di masa depannya. Banyak orang tua yang bahagia mendapat karunia anak, namun sering kebingungan menentukan cara yang tepat dalam mendidik anak. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya lalu ia membiarkan begitu saja, berarti telah berbuat kesalahan besar. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka serta tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah agama. Lalu menyia-nyiaakan anak ketika kecil sehingga mereka

tidak bisa mengambil keuntungan dari diri mereka an merka pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tua mereka ketika mereka dewasa.”¹²

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.¹³ Antara hak dan kewajiban seharusnya tidak boleh berat sebelah, dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban haruslah seimbang. Berikut merupakan beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua: dihormati dan dihargai serta di dengarkan nasihatnya. Adapun kewajiban orang tua, yaitu: melindungi rumah tangga, mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak-anak, mendidik anak-anak, dan menyayangi seluruh anggota keluarga.¹⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bagian kedua Pasal 7 menyebutkan:

- (1) orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

¹² Akmansyah, *Pendidikan Akidah Bagi Anak Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hl. 1-2

¹³ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta, Teras, 2009), h.92

¹⁴ Rachmat, dkk, *Kewarganegaraan 2*, (Jakarta, Grasindo, 2004), h.74

- (1) Pasal 289 KUHPdata orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.
- (2) Pasal 299 KUHPdata menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya.

Dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁵

F. Hak dan Kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pemerintah ialah suatu lembaga atau organisasi yang berkuasa dan berhak menjalankan suatu hukum pemerintahan di suatu wilayah tertentu baik dalam rumpun Negara, propinsi, kabupaten, bahkan kecamatan sekalipun. Tentu pemerintah dalam menjalankan tugasnya pemerintah memiliki beberapa hak dan kewajiban, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun hak-hak pemerintah pusat antara lain: ¹⁶

1. Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintah
2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah
3. Menugaskan sebagian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah

¹⁵ Khoiruddin Nasution, “*Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Al-‘Adalah, Vol. XIII No. 1, 2016, hl. 1-2

¹⁶ <http://zonazeruu.blogspot.com/2016/06/hak-dan-kewajiban-pemerintah-dan.html>, diakses pada 5 agustus 2019, jam 09:56 wib

Sedangkan kewajiban pemerintah pusat yaitu:

1. Politik luar negeri (berkaitan dengan pola hubungan kerja sama yang dibangun dengan negara lain)
2. Pertahanan negara
3. Keamanan negara
4. Yustisi (penegakan hukum)
5. Moneter dan fiskal (berkaitan dengan keuangan negara dan pemungutan pajak)
6. Agama

Selain hak dan kewajiban pemerintah pusat ada juga hak dan kewajiban pemerintah daerah, antara lain:¹⁷

Hak pemerintah daerah:

1. Mengelola kekayaan daerah, mengelola kekayaan yang ada di daerah juga menjadi hak pemerintah daerah.
2. Memanfaatkan sumber daya alam, yang ada disekitar atau di dalam daerah tersebut.
3. Mengelola aparatur daerah, mengelola aparatur daerah seperti gubernur, bupati, walikota, camat, kepdas dll juga termasuk hak pemerintah daerah.
4. Memungut pajak dan retribusi, memungut pajak dan retribusi yang ada di wilayah daerahnya juga termasuk hanya pemerintah daerah.

¹⁷ ¹⁷<https://www.draftgorenh.com/hak-dan-kewajiban-pemerintah-daerah-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 5 agustus 2019 jam 10:31 wib

5. Mendapatkan sumber-sumber yang lainnya, seperti pendapatan dan penjualan milik daerah yang dijual dengan lelang, mendapat sumber dari BUMD ataupun BPD
6. Memilih pemimpin daerah, pemerintah daerah juga memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah.
7. Mendapatkan hak lain yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah:

1. Meningkatkan kualitas hidup, kewajiban yang utama bagi pemerintah daerah yaitu bisa mensejahterakan rakyatnya maka meningkatkan kualitas hidup bagi rakyatnya adalah kewajiban bagi pemerintah daerah.
2. Menyediakan tempat kesehatan, tempat-tempat kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit adalah salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah apalagi menyediakan program gratis berobat bagi mereka yang tidak mampu.
3. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, pendidikan merupakan salah satu tempat yang penting untuk diperhatikan karena dari sinilah bisa tumbuh pemuda pemudi Indonesia yang bisa membanggakan nusa dan bangsa dan tentunya nama daerah juga akan mendapatkan getahnya jadi tempat pendidikan seperti sekolah atau madrasah juga menjadi pemicu utama kewajiban pemerintah daerah.

Ada dua kewajiban utama/pokok dalam Islam yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Inilah yang paling penting untuk diperhatikan dan dijaga. Kedua, mengatur urusan

dunia, sebab segala urusan tidak akan berjalan dengan lurus dan segala yang menjadi tujuan umum pun tidak akan tercapai kecuali dengan tertibnya urusan dunia secara umum, yaitu dengan mengambil langkah-langkah konkret dan kerja nyata, tidak sekedar imbauan saja tetapi ada bukti nyata di lapangan.

Dari dua kewajiban ini kemudian berkembang menjadi beberapa kewajiban Al-Imam al-Mawardi rahmatullah telah mengulasnya dalam kitab Ahkamus Sulthaniah. Beliau berkata “yang menjadi kewajiban atas pemerintah terkait dengan urusan-urusan umum, diantaranya :¹⁸

1. Menjaga agama (Islam) dengan dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan yang telah disepakati generasi umat terdahulu yang saleh.
2. Memutuskan hukum atas dua belah pihak yang berselisih dan meleraikan dua belah pihak yang bertikai sehingga yang zalim tidak lagi bertindak semena-mena dan terzalimi tidak lagi merasa lemah.
3. Menjaga regenerasi Islam dan memberikan perlindungan kepada kaum hawa, sehingga semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat melakukan perjalanan (safar) dengan rasa aman tanpa ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ataupun hartanya.
4. Menerapkan/menegakkan hukum, agar larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar serta hak-hak hamba-Nya pun tidak sirna dan rusak.
5. Menjaga perbatasan wilayah dengan persiapan yang baik dan kekuatan yang mumpuni.

¹⁸ <https://asysyariah.com/kewajiban-pemerintah/>, diakses 6 agustus 2019 jam 10:12 wib

Adapun kita sebagai manusia harus taat pada perintah pemimpin kita, yaitu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Disini di jelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kita, kita harus melaksanakannya, dalam ayat ini Allâh menyebutkan kata perintah “*taatilah*” dalam konteks ketaatan kepada Allâh Azza wa Jalla dan ketaatan kepada Rasul-Nya, dan Allâh Azza wa Jalla tidak menyebutkan lagi kata perintah tersebut dalam konteks ketaatan kepada ulil amri (penguasa/pemimpin), tetapi menjadikan ketaatan kepada *ulil amri* ini mengikuti ketaatan kepada Allâh dan Rasul-Nya. Maka Allâh membedakan antara ketaatan secara mutlak kepada Allâh dan Rasul-Nya dengan ketaatan kepada *ulil amri* yang bersifat *muqayyad* (terikat). Kemudian Allâh Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengembalikan perselisihan yang terjadi kepada Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya setelah perintah untuk taat kepada *ulil amri*, sebagai penguat prinsip makna sebelumnya.

Pendidikan Indonesia sekarang terlihat seperti mengikuti kapitalisme kehidupan, dimana mereka yang memiliki modal yang lebih baik akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Harusnya kita harus belajar dari konsep ekonomi dasar bahwa pendidikan harus dapat dikelola dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya pendidikan yang bermutu tidak selalu harus berbiaya mahal. Setiap manusia memiliki hak-hak yang sama baik itu dari bidang menerima pendidikan, pengajaran, dll. Oleh sebab itu, setiap manusia mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama.

Keadilan harus menjadi pertimbangan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan atau keputusan yang diambil. Siapa yang berlaku adil, maka sesungguhnya ia telah berakhlak dengan salah satu akhlak Allah, *al-'Adl* (Yang Maha Adil). Begitupun dengan pendidikan, pendidikan dalam Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan-perbedaan diantara manusia dan harus menjunjung tinggi keadilan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan pendidikan perlu menjadi program pemerintah karena dengan pendidikan yang merata tentu akan memberikan peluang yang merata juga bagi warga, seperti peluang menjadi pemimpin, pengusaha dan sebagainya bagi daerah masing-masing.

Misalnya saja keadilan yang merata dalam pendidikan untuk seluruh warga Indonesia, di mana pendidikan di Negara Indonesia masih belum adil dan merata dan ini tentu menimbulkan kesenjangan sosial bagi tiap-tiap daerah sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan sosial, politik dan sebagainya. Jika saja Negara mampu memberikan dan menerapkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia dalam pendidikan maka tentu kesenjangan sosial yang kadang menimbulkan konflik bisa teratasi, karena dengan keadilan yang merata dalam pendidikan untuk seluruh Warga Negara tentu menjadikan negara lebih bisa melakukan pembangunan yang merata dengan SDM di tiap-tiap daerah warga tersebut.

Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam bagian keempat Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab IV tentang sistem pendidikan nasional. Merujuk pada undang-undang ini ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pendidikan yaitu:

1. Pelaksanaan wajib belajar

Dijelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 butir 18)

2. Menteri sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penentu kebijaksanaan serta standar pendidikan secara nasional

Penanggung jawab pendidikan adalah Menteri Pendidikan Nasional, yang berhak menentukan nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Dijelaskan, Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. (Pasal 1 butir 30)

3. Pengarah, pembimbing, pembantu, dan pengawas

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10)

4. Memberikan layanan, kemudahan dan jaminan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 Ayat (1))

5. Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan

Dijelaskan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama

kab/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah (Pasal 38 Ayat (1) dan (2))

6. Memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Pasal 41 Ayat (3))

7. Melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 Ayat (3))

8. Menyediakan pendanaan/anggaran pendidikan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 Ayat (2)). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 46 Ayat (1) dan (2)). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan

berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 Ayat (1) dan (2))

9. Mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional

Pemerintah dan/pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kesatuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional (Pasal 50 Ayat (3))

10. Pemerintah daerah provinsi sebagai koordinasi

Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kab/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah (Pasal 50 Ayat (4)).

11. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal

Pemerintah kab/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 Ayat (6)). Pada Pasal 37 Ayat (1) huruf j menjelaskan, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: muatan lokal.

12. Pengelolaan satuan pendidikan nonformal

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 52 Ayat (1))

13. Melakukan evaluasi

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Pasal 59 Ayat (1))

14. Memberikan izin pendirian satuan pendidikan

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 63 Ayat (1) dan (3))

Sedangkan untuk pemberian izin pendirian satuan pendidikan diselenggarakan oleh perwakilan negara asing, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Pasal 64 menjelaskan, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan Negara asing di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga Negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia.

15. Melakukan pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pasal 66 Ayat (1)).

16. Menentukan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 16).¹⁹

G. Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-jenis Perkembangan Peserta Didik

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum undangundang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.²⁰

Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai

¹⁹<http://ademujhiyat.blogspot.com/2016/05/hak-dan-kewajiban-pemerintah-terhadap.html>, diakses 8 Agustus 2019, jam 10:17 wib

²⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, (Bandung, Permana, 2006), h. 65.

sifat-sifat dan keinginan sendiri".²¹ Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan.²² Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.²³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

Sementara itu mengenai peserta didik berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Bab IV pasal 16 menyatakan bahwa:

1. peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib: a. lulus dan memiliki ijazah MI/sekolah dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; b. memiliki surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) MI/SD/SDLB/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

²¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 205

²² Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2010), h. 121

²³ Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 47

2. MTs wajib menerima warga Negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
3. MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.²⁴

Setelah pengertian peserta didik ada juga karakteristik peserta didik. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari yang mengacu kepada tingkah laku yang mengarah pada kepribadian yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Dimana karakteristik dapat diartikan sebagai ciri yang lebih ditonjolkan dalam berbagai aspek tingkah laku.²⁵

Peserta didik merupakan orang yang mendapatkan pengaruh dari berbagai kelompok yang sedang melaksanakan pendidikan. Peserta didik merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena peserta didik dijadikan sebagai titik persoalan dalam berbagai aktifitas kegiatan belajar mengajar. Dalam aspek psikologis, peserta didik merupakan titik penentu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik dalam artian bentuk fisik maupun psikis. Namun, peserta didik juga berhak mendapatkan bimbingan yang terarah dan konsisten dalam menentukan kemampuan yang sebenarnya. Peserta didik disebut sebagai insan yang menarik. Karena memiliki fisik dan psikis yang unik. Berbagai potensi yang dimiliki oleh

²⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, (Jakarta, 2013) h. 7

²⁵ Daryanto & Rachmawati, *Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik*, (Yogyakarta, Gava Media, 2015) h. 11

peserta didik masih memerlukan perkembangan guna mencapai kebutuhan untuk perkembangan yang sangat optimal.

Menurut Reigeluth (1993) seorang ilmuwan pembelajaran yang menetapkan bahwa kedudukan karakteristik peserta didik merupakan komponen terpenting dalam pengembangan pengelolaan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang didalamnya terdapat dimensi, metode, dan strategi yang telah dikembangkan dalam pembelajaran. Sehingga menganalisis karakteristik peserta didik merupakan suatu langkah awal yang harus dikembangkan. Strategi dan model dikembangkan dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpandangan kepada karakteristik peserta didik.

Menurut Reigeluth (1993) seorang ilmuwan pembelajaran yang menetapkan bahwa kedudukan karakteristik peserta didik merupakan komponen terpenting dalam pengembangan pengelolaan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang didalamnya terdapat dimensi, metode, dan strategi yang telah dikembangkan dalam pembelajaran. Sehingga menganalisis karakteristik peserta didik merupakan suatu langkah awal yang harus dikembangkan. Strategi dan model dikembangkan dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpandangan kepada karakteristik peserta didik.

Kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik merupakan tonggak untuk memilih strategi pembelajaran yang cocok. Kemampuan peserta didik yang dijadikan sebagai kemampuan awal atau tonggak ini berperan untuk

meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini menyebabkan perubahan besar yang membantu memudahkan proses internal yang terjadi pada peserta didik pada saat mereka melakukan kegiatan belajar. Secara umum karakteristik peserta didik yang disebut sebagai karakter individu ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor usia, latar belakang, dan keturunan. Faktor – faktor tersebut telah dibawa sejak peserta didik lahir. Tetapi faktor tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan dari lingkungan sosial yang menjadi titik awal menentukan kualitas hidup.

Menurut Reigeluth (1993) mengungkapkan bahwa karakteristik peserta didik terbagi empat yakni antara lain :

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu intelektual yang dimiliki oleh peserta didik. Pengetahuan inilah yang disebut dengan intelegensi siswa yang harus tetap dipertahankan untuk kemampuan peserta didik.

2. Gaya

Reigeluth mengidentifikasi gaya belajar peserta didik menjadi tiga tipe yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar pada peserta didik merupakan suatu tipe dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Sehingga peserta didik akan selalu menggali potensinya dengan cara gaya belajar mereka sendiri. Setiap peserta didik yang memiliki gaya belajar visual mereka akan belajar memahami dengan apa yang mereka lihat. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori lebih memahami pembelajaran dengan cara

mendengar apa yang mereka dengar. Sementara gaya belajar kinestetik memahami dengan cara menggerakkan tubuhnya, entah itu sentuhan ataupun pada rabaan. Namun dalam kenyataannya setiap peserta didik pasti memiliki ketiga gaya belajar tersebut. Tetapi hanya salah satu yang mendominasi dalam gaya belajar mereka.

3. Minat

Minat merupakan suatu hal yang berpengaruh besar terhadap belajar peserta didik. Apabila materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik maka, peserta didik akan bersemangat dan tidak berambisi dalam mempelajarinya. Karena bagi mereka, tidak akan ada daya tarik yang membuat mereka untuk berambisi dalam mempelajarinya. Sehingga tidak akan ada kepuasan bagi peserta didik. Tapi jika materi pelajarannya diminati dan menarik peserta didik maka akan menumbuhkan minat dan menambah semangat terhadap kegiatan pembelajaran. Peserta didik yang kurang meminati materi pembelajaran, maka dapat diusahakan untuk mempunyai minat yang cukup besar dengan cara menjelaskan menggunakan metode yang menarik dan hal yang berguna bagi peserta didik. Serta dapat dilakukan dengan mendongkrak semangat peserta didik untuk menjelaskan materi yang berhubungan dengan cita-cita yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari.

4. Motivasi Belajar

Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Karena pendidik harus mampu mendorong dan mendongkrak peserta didik agar

dapat belajar dengan tekun dan bersemangat dalam merencanakan maupun melaksanakan sesuatu yang selalu ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Menurut Reigeluth (dalam Degeng, 1999) motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni:

- a. Motivasi intrinsik merupakan hal yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan belajar. Motivasi intrinsik merupakan suatu kesenangan materi yang menyangkut tentang kehidupan masa depan peserta didik sendiri.
- b. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi yang datang dari luar individu peserta didik yang dapat mendorong untuk tekun belajar. Adanya hadiah maupun pujian merupakan contoh yang konkrit pada motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Tidak adanya motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik dapat berpengaruh terhadap kurang bersemangatnya dalam melakukan proses mempelajari materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah.²⁶

Terakhir ada jenis- jenis perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan system organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Pengembangan diri adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada

²⁶ <http://yunitaikamujianti.web.unej.ac.id/2017/09/20/karakteristik-peserta-didik/> diakses 8 Agustus 2019, jam 10:45 wibh.

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.²⁷

Jenis-jenis perkembangan peserta didik, yaitu:²⁸

1. Perkembangan Fisik

Manusia terdiri dari fisik dan psikhis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, mulai tahap anak-anak usia lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa nak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.

2. Perkembangan Kognitif

Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Termen Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hunt menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa manusia pada saat lahir tidak mengetahui apapun, tetapi Allah membekalinya dengan kemampuan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Penjelasan ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat an-Nahl/16: 78:

²⁷ Junaidah, *Upaya Pengembangan Diri Peserta Didik*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lapung, 2016), hl. 32

²⁸ Masganti, *Perkembangan Peserta Didik*, (Medan, Perdana Publishing, 2012) , h.1-170

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Qs. An-Nahl [16]:78)

3. Perkembangan Sosial

Merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan social. Perkembangan social dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja sama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri, mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Islam manusia memiliki tanggung jawab sosial yang berat. Di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Qs. Al-Baqarah [2]:30)

4. Perkembangan Emosi

Sebagian orang mengartikan emosi sama dengan perasaan. Orang-orang telah mencoba untuk memahami fenomena emosi selama ribuan tahun. Definisi utama emosi mengacu pada perasaan kuat yang melibatkan pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi pada sebuah perilaku.

5. Perkembangan Moral

Adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya sesuatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin *mores* sendiri berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan.

6. Perkembangan Agama

Perkembangan agama pada anak menurut ajaran Islam telah ada sejak anak lahir. Fitrah bagaimana dalam diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan "suci" yang diilhami oleh Tuhan Yang Maha Esa telah ada dalam diri anak sejak dia berada di tulang sulbi orang tuanya. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya pada Al-Qur'an surah al-A'raf/7: 172 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”. (Qs. Al-A’raf [7]:172)



BAB III

DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Tentang SMA Negeri 2 Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat

SMA Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah negeri di Propinsi Lampung yang secara geografis terletak di tengah kota Bandar Lampung, tepatnya di Tanjung Karang Pusat yang beralamatkan di Jln. Amir Hamzah No. 01 Gotong Royong. Di wilayah ini banyak terdapat sarana pelayanan publik, tempat tinggal. Demikian juga sarana dan prasarana sangat memadai mulai dari masjid, sekolah, perkantoran, dan tempat usaha. Sehingga adanya sekolah di wilayah Bandar Lampung sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.

SMA Negeri 2 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1965 atas prakasa guru-guru SMA Negeri 1 Tanjung Karang bersama dengan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) sebagai pengembangan SMA Negeri 1 Tanjung Karang yang pada waktu itu merupakan satu-satunya SMA Negeri di kawasan Tanjung Karang Teluk Betung. Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 SMA Negeri 2 Tanjung Karang disahkan sebagai SMA dengan nomor 308 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 96/SK/B/III-65-66 tanggal 17 Juli 1965 melalui Surat Edaran No. 1/65 Kepala Inspeksi Daerah SMA Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Daerah Lampung dengan nomor surat edaran No. 1/65.

SMA Negeri 2 Bandar Lampung pertama kali dipimpin oleh Bapak Drs. Hi. Tabrani Daud. Jabatan Kepala Sekolah kemudian diserahkan dari Bapak Drs. Hi. Tabrani Daud kepada Bapak Drs. Hi. Moh. Yasin Idris setelah beliau diangkat menjadi Wali Kotamadya Tanjung Karang Teluk Betung oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK No. Pemda/7/1/35/1969 tanggal 6 Februari 1969, Pada awalnya gedung SMA Negeri 2 Tanjung Karang terletak bersebelahan dengan SMA Negeri 1 Tanjung Karang, tetapi kemudian ditukar dengan gedung STIKMA/STMA di Gotong Royong oleh Pemda Tingkat I Propinsi Lampung.

SMA Negeri 2 Bandar Lampung telah berkembang sangat cepat dan mengesankan sehingga menjadi sekolah harapan masyarakat luas. Bahkan berdasarkan SK No. 420/596/III.11/DP/2002 pada tahun 2002 SMA Negeri 2 Bandar Lampung dipercaya untuk mengelola program akselerasi dan pada tahun 2007 dengan SK No. 697/C4/MN/2007 SMA Negeri 2 Bandar Lampung dipercaya untuk menjadi sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung banyak yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi favorit di Indonesia, bahkan banyak diantara mereka yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi di Luar Negeri. Saat ini banyak alumni lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang menjadi para pejabat mulai dari pegawai biasa hingga seorang pejabat tinggi.

Adapun nama-nama kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 1) Drs. Hi. Tabrani Daud (1965-1969); 2) Drs. Hi. Moh.

Yasin Idris (1969-1992); 3) Drs. Sutrisno (1992, selama 3 bulan); 4) Drs. Hi. Muhammad Matin (1992, selama 3 bulan) 5) Drs. Hi. S. Kardi Idris (1992-2002); 6) Drs. Ali Imron, M.Sc (2002-2005); 7) Sudarto, S.E., S.Pd (2005 s.d. 2009); 8) Drs. H. Sobirin, M.Pd. (2010 s.d. April 2017) dan Drs. Jumani Darjo, M.Pd. (27 April 2017 s.d Sekarang).

Struktur pimpinan dan staf SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut: 1) Kepala Sekolah: Drs.Jumani Darjo, M.Pd.; 2) Wakil kepala sekolah urusan kurikulum: M. Kholid, M.Pd.; Wakil kepala sekolah urusan Sarana dan Prasarana: Dra. Dewi Puji Astuti, M.Pd.; Wakil kepala sekolah urusan Kesiswaan: Budi Setiadi, M.Pd. ;dan Wakil kepala sekolah urusan Hubungan Masyarakat: Drs. H. Haryanto, M.Pd.; Sedangkan Kepala Tata Usaha adalah Handarudin, SH. dan bendahara sekolah Subekti, S.Sos. Tenaga guru yang ada di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2017/2018 terdiri dari : Guru Tetap (GT) berjumlah 64 orang, Guru Tidak Tetap (GTT) berjumlah 33 orang. Tenaga Kependidikan terdiri atas Tata Usaha (TU) berjumlah 6 orang, Perpustakaan berjumlah 3 orang, dan karyawan berjumlah 22 orang.

2. Tujuan

a. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b. Tujuan Pendidikan Menengah

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan KTSP untuk SMA pelaksana Kurikulum 2013 difokuskan pada perubahan Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia, berkaitan dengan SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan dan keterampilan, yaitu:

- 1) Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 2) Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.

- 3) Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

3. Visi

Visi SMA Negeri 2 Bandar Lampung adalah **"Religius, Santun, Unggul dan Terdepan"**.

Indikator Visi:

- a. Suasana sekolah agamis yang didukung oleh adanya tempat ibadah yang representatif untuk semua warga sekolah.
- b. Terciptanya suasana kerukunan antar warga sekolah, saling menghargai, saling menghormati dan terwujudnya budaya senyum salam dan sapa (3S)
- c. Memiliki prestasi yang ditandai dengan lebih dari 90% lulusan terserap di PTN ternama.
- d. Menjadi duta Propinsi Lampung dalam mengikuti even perlombaan pada tingkat Propinsi, Nasional, maupun Internasional.
- e. Menjadi rujukan pengembangan sekolah lain dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik.

4. Misi

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana serta manajemen secara profesional menuju sekolah unggul untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta didik.

- b. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembelajaran dan administrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap peserta didik.
- c. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian unggul dan cerdas komprehensif.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran secara profesional dengan berbasis aneka sumber belajar untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, dan cerdas komprehensif serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
- e. Menjalinkan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak sebagai upaya perluasan akses pelayanan terhadap peserta didik.

5. Tujuan Sekolah

a. Tujuan Jangka Menengah (2017-2021)

- 1) Memiliki sarana sekolah yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Memiliki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang representatif.
- 3) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran secara profesional untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, cerdas komprehensif, dan siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- 5) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dalam upaya pengembangan diri peserta didik.
- 6) Menjalinkan kerja sama kemitraan secara sinergis dengan pihak lain dalam rangka memperluas pelayanan peserta didik.

b. Tujuan Jangka Pendek (2017-2018)

- 1) Meningkatnya kedisiplinan pendidik dan tenaga kependidikan untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif.
- 2) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
- 3) Terwujudnya pembelajaran berbasis IT.
- 4) Meningkatnya daya serap pelajaran 100% dan rata-rata nilai UN 80,00.
- 5) Memiliki Kelompok Ilmiah Remaja yang mampu tampil di tingkat provinsi maupun nasional.
- 6) Memiliki tim olimpiade sains dan mampu menjadi delegasi provinsi, maupun nasional.
- 7) Memiliki tim olah raga minimal 1 cabang dan mampu menjadi delegasi provinsi, maupun nasional.
- 8) Memiliki pasukan pengibar bendera yang mampu menjadi delegasi provinsi maupun nasional.
- 9) Memiliki tim PMR yang mampu menjuarai tingkat provinsi maupun nasional.
- 10) Memiliki tim pramuka yang mampu menjadi delegasi provinsi maupun nasional.

- 11) Memiliki tim kesenian yang berprestasi dan siap tampil dalam acara-acara setingkat provinsi maupun nasional.
- 12) Memiliki tim kerohanian yang mampu menjadi delegasi di tingkat provinsi maupun nasional.
- 13) Memiliki peserta didik yang mampu berbahasa Inggris aktif (lisan maupun tulis) dan mampu menjuarai lomba bahasa Inggris di tingkat provinsi maupun nasional.
- 14) Memiliki peserta didik yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan social, fisik dan Kultural, mampu menghasilkan karya, dan terampil dalam kewirausahaan.
- 15) Menghasilkan lulusan yang berkepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, cerdas komprehensif, dan siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi bagian masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

6. Sarana dan Pra Sarana Sekolah

SMA Negeri 2 Bandar Lampung berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 29.650 m² di daerah Gotong Royong. Tanah tersebut berstatus kepemilikan hak pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. BPN.III/KW.122/SK/HP/92 tanggal 11 Desember 1992.

Penggunaan tanah tersebut antara lain untuk :

No	Nama	Kuantitas	Luas (M ²)
1	Ruang belajar	36	72
2	Ruang Kepala Sekolah	1	28
3	Ruang Wakil Kepala Sekolah	1	70
4	Ruang Guru	1	216
5	Ruang Tata Usaha	1	36
6	Ruang Perpustakaan	1	160
7	Laboratorium Fisika	1	96
8	Laboratorium Kimia	1	120
9	Laboratorium Biologi	1	144
10	Laboratorium Bahasa	1	96
11	Laboratorium Komputer	1	72
12	Laboratorium Multimedia	1	72
13	Laboratorium PAI	1	72
14	Ruang Server	1	24
15	Pusat Sumber Belajar	1	63
16	Ruang UKS	1	56
17	Ruang BP/BK	1	72
18	Masjid	1	320
19	Ruang penjaga sekolah	2	60
20	Perumahan Guru dan Karyawan	6	200

No	Nama	Kuantitas	Luas (M ²)
21	Kantin sekolah	14	240
22	Gudang	2	93
23	Ruang OSIS	1	72
24	Kamar Mandi/WC siswa	22	66
25	Kamar mandi/WC guru	6	36
26	Lapangan Bola	1	1600
27	Lapangan Volley	2	400
28	Lapangan Basket	1	300
29	Lapangan Tennis	1	240
30	Lain-lain		24.554

Sumber: Sarana dan Pra Sarana Sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung

B. Pelaksanaan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional. System pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk menjamin terlaksananya system pendidikan nasional disusunlah UU Nomor 20 tahun 2003. Berisi tentang ketentuan umum, fungsi, dan tujuan, penyelenggaraan,

pengelolaan, evaluasi, penjamin wajib belajar, hak dan kewajiban masyarakat, dan ketentuan penutup.

Begitu pula dengan SMAN 2 Bandar Lampung, menurut Bapak Kholid S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris PPDB Tahun 2018 mengatakan Kebijakan penerimaan siswa berbasis zonasi ini mengalokasikan minimal 90% kuota sekolah negeri untuk menerima calon siswa berdasarkan jarak rumah-ke-sekolah dan 10% sisanya untuk prestasi dan perpindahan. Menurutnya, bahwa sistem PPDB zonasi ini bertujuan meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri, tanpa memandang kelas ekonomi orang tua siswa. Namun menurutnya, system zonasi ini berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Tidak hanya pemerataan siswa namun juga guru mendapatkan pemerataan tuturnya.

Para guru yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dengan kemampuan yang sangat beragam. Padahal, keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan

kemampuannya. Di sisi lain, anak-anak berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman ilmunya dengan benar.

Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif homogen. Guru yang mengajar kelas yang homogen cenderung dapat mengajarkan seluruh siswa dengan seiring sejalan. Namun, ketika kelas yang diajar relatif heterogen, guru harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak yang cepat dan lambat dalam belajar. Semakin besar kesenjangan kemampuan anak, semakin besar beban guru dalam mengajar.

Masalahnya, penyesuaian kemampuan guru mengajar ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Alhasil, proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan secara optimal dan menciptakan kekagetan yang justru mengganggu proses belajar di kelas.

Terlepas dari masalah yang dihadapi guru, siswa pun mengalami tantangan akibat komposisi kelas yang heterogen. Siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian, siswa yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan.

Jika dilihat secara geografis, data lokasi sekolah di sekolah kita menunjukkan bahwa sekolah negeri tidak tersebar secara merata jika dibandingkan dengan persebaran tempat tinggal calon siswa. Dalam PPDB zonasi, kondisi ini merugikan calon peserta didik yang domisilinya relatif jauh dengan sekolah negeri di sekitarnya. Satu-satunya peluang lain bagi calon

siswa tersebut untuk terdaftar di sekolah negeri adalah dengan mengejar kuota jalur prestasi yang paling banyak hanya 5% dari total kuota.

Meski sekolah swasta tidak diwajibkan mengikuti sistem PPDB zonasi, sekolah swasta terpapar dampak tidak langsung dari perubahan di sekolah negeri. Sekolah swasta yang letaknya berdekatan dengan beberapa sekolah negeri dan tidak berada pada perumahan padat penduduk akan merugi karena mereka berpotensi kehilangan calon siswa dalam jumlah besar. Di sisi lain, sekolah swasta dengan kualitas yang relatif baik akan diuntungkan karena berpotensi menerima lebih banyak pendaftar dengan capaian kemampuan tinggi yang tidak diterima di sekolah negeri akibat sistem PPDB zonasi.¹

Menurut siswa senior kelas XII yang bernama Tasya Amalia berpendapat adanya perbedaan antara adik kelasnya yang berada 1 tingkat dibawahnya dengan adik kelas yang 2 tingkat dibawahnya. Menurutnya, perbedaan itu jauh sekali, sebab ia melihat jika adik tingkat yang diterima berdasarkan zonasi itu banyak yang berperilaku kurang baik dan kurang disiplin. Ia berkata tidak semuanya seperti itu namun kebanyakan memang masih banyak yang terbawa pergaulan dari sekolahnya yang dulu dan belum terbiasa dengan SMAN 2 Bandar Lampung yang penuh dengan kedisiplinan. Dan ia menambahkan jikalau seperti ini terus, reputasi baik SMAN 2 Bandar Lampung akan menurun.²

¹ Wawancara dengan Bapak Kholid S.Pd.,M.Pd. selaku sekertaris PPDB, Tanggal, 12 Agustus 2019, di SMAN 2 Bandar Lampung

² Wawancara dengan Tasya Amalia, selaku sisaw kelas XII, Tanggal 13 Agustus 2019, di SMAN 2 Bandar Lampung

Namun, menurut Nadia Azzahra Bella Putri yang diterima melalui system zonasi dan berasal dari SMPN 12 Bandar Lampung seorang diri menuturkan ia sangat senang sekali dengan adanya system zonasi ini, karena menurutnya system zonasi membawanya ke sekolah favorit tanpa adanya tes dan hanya melihat jarak rumah ke sekolah saja. Ia menjelaskan banyak sekali teman-temannya yang ingin sekali sekolah disini namun karena terhalang jarak mereka memupuskan harapan walaupun menurutnya teman-temannya dinilai lebih mempunyai kualitas yang lebih daripada dirinya. Sekali lagi ia berterimakasih kepada pemerintah telah membuat kebijakan zonasi ini, semoga kedepannya ia akan terbiasa di sekolah barunya dan dapat meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih mumpuni dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan.³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan banyak sebagian yang merasa dirugikan dengan adanya system zonasi. Tak pelak juga ada yang merasa bersyukur dengan adanya system zonasi ini.

Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (ppdb) SMA Negeri provinsi lampung tahun pelajaran 2018-2019

1. Latar Belakang

Kegiatan PPDB dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai

³ Wawancara dengan Nadia Azzahra B.P selaku siswa kelas X, tanggal 13 Agustus 2019, di SMAN 2 Bandar Lampung

dengan ketentuan yang berlaku. Juknis ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dalam juknis ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya juknis ini diharapkan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri Provinsi Lampung dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut di atas.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2018/2019 adalah:

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pengganti PP Nomor 17 Tahun 2010
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- e. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
- f. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/700/V.01/DP.1C/ 2018 Tanggal 15 Maret tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK /TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/ 2019.

- g. Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/ 2019.
- h. Hasil Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung beserta MKKS , SMA, SMK dan Pengawas se Provinsi Lampung tanggal 27 April 2018.
- i. Hasil Rapat MKKS SMA-SMK Kota Bandar Lampung dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanggal 1 Mei 2018.
- j. Rapat MKKS SMA Provinsi Lampung Tanggal 14 Mei 2018 dan 18 Mei 2018 tentang Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2018-2019.

3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan juknis penerimaan peserta didik baru ini adalah:

- 1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- 2. Memenuhi azas keadilan peserta didik.
- 3. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

4. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

4. Mekanisme Pendaftaran,

Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan pengumuman kelulusan PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 dilaksanakan secara terbuka dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan.

5. Sistem Penerimaan

PPDB SMA Negeri se Provinsi Lampung tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme online dengan sistem zonasi, non zonasi, serta mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan pilihan pertama dengan menggunakan nomor ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat.
- b. Sistem Zonasi, yaitu setiap satuan pendidikan menerima 75% calon peserta didik baru yang berasal dari lingkungan satuan pendidikan yang dipilih di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- c. Dalam hal sistem zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan jumlah

skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dan nilai UNBK/UNKP saat ujian di SMP/MTs.

- d. Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang dipilih adalah sebagai berikut:

No	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor	No	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor
1	0000-1000	400	8	7001-8000	225
2	1001-2000	375	9	8001-9000	200
3	2001-3000	350	10	9001-10000	175
4	3001-4000	325	11	10001-11000	150
5	4001-5000	300	12	11001-12000	125
6	5001-6000	275	13	12001-~	100
7	6001-7000	250			

Sumber: Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun

Pelajaran 2018-2019

- e. Sistem non zonasi, yaitu setiap satuan pendidikan menerima 25% calon peserta didik baru yang berasal dari,
- 1) Putra-putri kandung dari keluarga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ditempatkan orang tua bertugas dan pengawas pembina pendidikan yang bertugas di sekolah tersebut maksimal 5% atau menyesuaikan
 - 2) Peserta didik berasal dari luar Kabupaten/Kota maksimal 5%
 - 3) Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik maksimal 5%
 - 4) Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik maksimal 5%
 - 5) Hasil seleksi Ujian Mandiri (UM) maksimal 5% atau menyesuaikan
 - 6) Dalam hal point a), b), c), dan d) tidak terpenuhi maka akan ditambahkan pada point e).

- f. Seleksi Ujian Mandiri (UM) dilakukan dengan pola seleksi akademik, wawancara, dan kesanggupan orang tua calon peserta didik baru dalam hal pemenuhan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
- g. Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) didasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan perhitungan standar biaya pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah.

6. Mekanisme Pendaftaran

- a. Calon peserta didik baru mendaftar pada sekolah pilihan pertama.
- b. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia.
- c. Calon peserta didik baru pada sistem zonasi memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di Provinsi Lampung.
- d. Calon peserta didik baru pada sistem non zonasi (dari luar Kabupaten/Kota, berprestasi dalam bidang akademik, dan berprestasi dalam bidang non akademik), memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di Kabupaten/Kota yang dipilih.
- e. Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengawas pembina yang bertugas di sekolah tersebut dapat diterima secara langsung pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun 2018/2019 yang telah ditetapkan.
- f. Calon peserta didik baru yang mengikuti Ujian Mandiri (UM) hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan.

- g. Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Lampung yang akan mendaftar harus membawa surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Provinsi asal dan melapor di Panitia PPDB Provinsi Lampung.
- h. Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BOSDA Provinsi Lampung.
- i. Bagi siswa yang tidak diterima di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan tetap diberikan bantuan biaya pendidikan melalui BOSDA Provinsi Lampung setelah diverifikasi oleh tim.
- j. Point (8) dan (9) hanya berlaku bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Program BOSDA.

7. Syarat-Pendaftaran :

Persyaratan sebagai calon peserta didik baru adalah sebagai berikut:

- a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B;
- b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 16 Juli 2018 (awal Tahun Pelajaran 2018/2019).

8. Pemberkasan :

- a. Mengisi formulir pendaftaran warna putih rangkap 2, dan menyerahkan :

- 1) Foto Copy Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal dan dilegalisir sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan aslinya pada sekolah tempat mendaftar.
 - 2) Foto Copy KTP kedua orang tua masing-masing 1 lembar.
 - 3) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan menunjukkan aslinya serta berlaku minimal 6 bulan berjalan.
 - 4) Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
 - 5) Dua buah map kertas warna biru.
- b. Bagi siswa yang berasal dari keluarga belum mampu kriteria dan persyaratannya akan ditetapkan oleh tim verifikasi setelah dinyatakan diterima.
- c. Bagi anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan yang akan bersekolah di tempat orang tuanya bertugas menyerahkan :
- 1) Foto copy surat tugas/SK dari satuan pendidikan tempat bertugas
 - 2) Foto copy KTP, KK, KP4, dan akta kelahiran
 - 3) Dua buah map warna Biru.

9. Waktu Pendaftaran , Pengumuman , MPLS dan Awal PBM:

- a. Pendaftaran Langsung : 4 - 6 Juni 2018
- b. Pengumuman : 7 Juni 2018
- c. Pendaftaran UM : 7 Juni 2018
- d. Seleksi dan Tes UM : 8 Juni 2018
- e. Pengumuman UM : 9 Juni 2018

- f. Daftar Ulang : 7 - 9 Juni 2018
- g. MPLS : 16 - 18 Juli 2018
- h. Awal PBM : 16 Juli 2018

10. Langkah-Langkah Pendaftaran

Langkah-langkah pendaftaran secara online diatur sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran pembantu yang disediakan panitia sekolah.
Data yang diisi adalah Nomor Ujian Nasional SMP/MTs, data-data lainnya, No. Telpn/ HP yang bisa dihubungi dan mengisi urutan 2 pilihan SMA Negeri yang dipilih, kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran.
- b. Pada saat pengisian formulir pendaftaran calon peserta didik baru langsung menentukan pilihan jurusan IPA atau IPS yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- c. Setelah didaftarkan, oleh petugas kemudian akan di print out sebanyak 2 lembar, setelah di tempel foto dan di tandatangani petugas, satu lembar disimpan oleh petugas pendaftaran dan satu lembar diserahkan kepada calon peserta didik baru sebagai bukti pendaftaran dan akan dijadikan sebagai bukti pendaftaran ulang jika yang bersangkutan dinyatakan diterima.
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 X (satu kali). Bila calon peserta sudah terdaftar dalam sistem , maka tidak dapat melakukan perbaikan apapun termasuk melakukan pencabutan berkas.

- e. Peringkat sistem zonasi didasarkan pada jumlah skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dan Nilai UNBK/UNKP jika jumlah pendaftar melebihi jumlah daya tampung satuan pendidikan, sedangkan sistem non zonasi pemeringkatan didasarkan skor piagam prestasi atau ketentuan lain.
- f. Bila terjadi beberapa siswa memiliki skor yang sama baik sistem zonasi maupun sistem non zonasi, maka urutan peringkat didasarkan pada usia yang lebih tua dan apabila masih terdapat nilai yang sama maka diurutkan pada besaran nilai mata pelajaran (Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, Matematika, IPA).

11. Ketentuan Khusus:

- a. Prestasi yang dapat diperhitungkan dalam cabang akademik maupun non akademik meliputi kejuaraan/lomba yang berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementrian Agama/Pemerintah Daerah;
- b. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - a) Olimpiade Sains Nasional/Internasional (OSN/I) S/M;
 - b) LCT Mata Pelajaran S/M;
 - c) Ranking paralel di sekolah asal calon peserta didik S/M.
- c. Ranking paralel di sekolah SMP/ MTs ditentukan oleh nilai rata-rata raport semester 1 s.d. 5 dan diterbitkan dalam bentuk kolektif (jumlah siswa secara keseluruhan);

d. Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:

1. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Internasional (O2SN/I) S/M;
2. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional (FLS2N/I) S/M;
3. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional/ Internasional (LCSPN/I) S/M;
4. Kuis Ki Hajar (Kita Harus Belajar);
5. Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);
6. Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) S/M;
7. Lomba Cerdas Cermat (LCC) S/M
8. Lomba Karya Ilmiah Pelajar Nasional (LKIP) S/M;
9. Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik Nasional;
10. Peserta jambore pramuka;
11. Lomba Tingkat Pramuka;
12. Hafidz Qur'an

e. Prestasi diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak TP. 2015/2016

f. Piagam dilegalisir oleh sekolah asal dan menunjukkan aslinya.

g. Piagam prestasi yang diperhitungkan adalah salah satu piagam yang memiliki Skor Prestasi Tertinggi.

h. Penskoran piagam atau Surat Keterangan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Internasional, Juara 1 diberi Skor 400

2. Tingkat Internasional, Juara 2 diberi Skor 375
3. Tingkat Internasional, Juara 3 diberi Skor 350
4. Tingkat Nasional, Juara 1 diberi skor 375
5. Tingkat Nasional, Juara 2 diberi skor 350
6. Tingkat Nasional, Juara 3 diberi skor 325
7. Tingkat Provinsi, Juara 1 diberi skor 350
8. Tingkat Provinsi, Juara 2 diberi skor 325
9. Tingkat Provinsi, Juara 3 diberi skor 300
10. Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 1 diberi skor 325
11. Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 2 diberi skor 300
12. Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 3 diberi skor 275
13. Jambore Tingkat Internasional, diberi skor 375
14. Jambore Tingkat Nasional, diberi skor 350
15. Juara 1 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 350
16. Juara 2 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 325
17. Juara 3 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 300
18. Hafidz 21 s.d 30 juz, diberi skor 375
19. Hafidz 11 s.d 20 juz, diberi skor 350
20. Hafidz 3 s.d 10 juz, diberi skor 325
21. Rangking paralel 1 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 375
22. Rangking paralel 2 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 350
23. Rangking paralel 3 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 325
24. Rangking paralel 1 pada sekolah akreditasi B, diberi skor 350

25. Rangking paralel 2 pada sekolah akreditasi B, diberi skor 325
26. Rangking paralel 1 pada sekolah akreditasi C, diberi skor 325
- i. Bagi calon peserta didik baru yang telah diterima melalui sistem zonasi tidak diperkenankan mengikuti seleksi melalui sistem Ujian Mandiri (UM).
- j. Bagi calon peserta didik baru yang telah bermukim disalah satu Kabupaten/Kota tertentu dikarnakan yang berangkutan menempuh pendidikan di SMP/MTs di Kabupaten/Kota tersebut, maka yang bersangkutan dapat menggunakan alamat tinggal tersebut sebagai acuan untuk mendapatkan skor tempat tinggal.

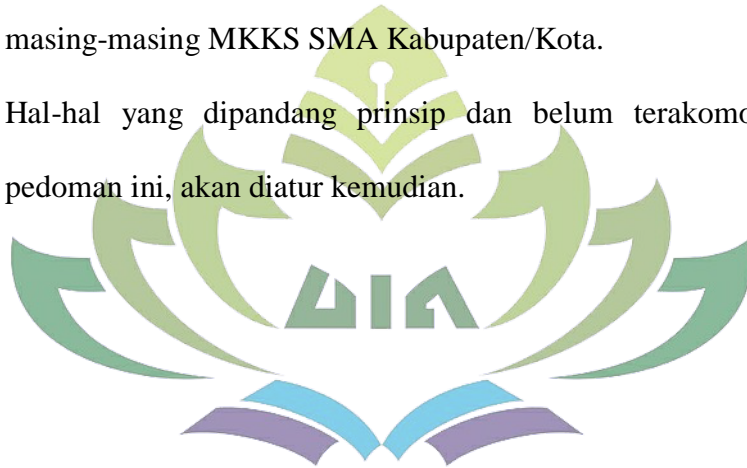
12. Daftar Ulang

1. Bagi peserta didik yang diterima harus melaksanakan daftar ulang.
2. Daftar ulang dilaksanakan tanpa dipungut biaya
3. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 9 Juni 2018 pada pukul 07.30 sd pukul 13.00
4. Daftar ulang dilaksanakan di satuan pendidikan dimana calon peserta didik diterima, dengan menyerahkan :
 - a) Foto copy Ijazah/SHUN/SKL yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar
 - b) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
 - c) Mengisi Biodata siswa yang diberikan oleh panitia sekolah
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap

mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur menjadi calon peserta didik baru.

13. Lain-Lain

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang peserta didik baru SMA Negeri se Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 tidak dipungut biaya (GRATIS)
2. Jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA Kabupaten/Kota.
3. Hal-hal yang dipandang prinsip dan belum terakomodasi di dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.



C. Data Peserta Didik Baru Tahun 2018 yang Sudah Diterima di SMA Negeri

2 Bandar Lampung

DATA SISWA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG										
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019										
No	Kelas	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Islam	Kristen	katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	X MIPA 1	19	15	34	32	2	0	0	0	34
2	X MIPA 2	25	9	34	33	1	0	0	0	34
3	X MIPA 3	16	20	36	32	4	0	0	0	36
4	X MIPA 4	21	15	36	35	1	0	0	0	36
5	X MIPA 5	22	14	36	33	2	1	0	0	36
6	X MIPA 6	24	11	35	33	2	0	0	0	35
7	X MIPA 7	23	8	31	26	1	3	1	0	31
8	X MIPA 8	15	17	32	29	3	0	0	0	32
9	X MIPA 9	24	12	36	34	2	0	0	0	36
Jumlah Mipa		189	121	310	287	18	4	1	0	310
10	X IPS 1	22	12	34	34	0	0	0	0	34
11	X IPS 2	17	9	26	24	1	0	0	0	25
12	X IPS 3	16	11	27	25	1	0	0	1	27
Jumlah IPS		55	32	87	83	2	0	0	1	86
Jumlah Seluruh		244	153	397	370	20	4	1	1	396
No	Kelas	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Islam	Kristen	katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	XI MIPA 1	23	13	36	34	1	1	0	0	36
2	XI MIPA 2	19	17	36	34	2	0	0	0	36
3	XI MIPA 3	20	16	36	36	0	0	0	0	36
4	XI MIPA 4	16	20	36	32	3	1	0	0	36
5	XI MIPA 5	18	18	36	35	0	0	1	0	36
6	XI MIPA 6	20	16	36	36	0	0	0	0	36
7	XI MIPA 7	17	19	36	35	1	0	0	0	36
8	XI MIPA 8	19	15	34	32	2	0	0	0	34
Jumlah Mipa		152	134	286	274	9	2	1	0	286
9	XI IPS 1	26	9	35	34	0	0	1	0	35
Jumlah IPS		26	9	35	34	0	0	1	0	35
Jumlah Seluruh		178	143	321	308	9	2	2	0	321

No	Kelas	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Islam	Kristen	katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	XII MIPA 1	25	19	44	38	2	1	3	0	44
2	XII MIPA 2	29	17	46	43	3	0	0	0	46
3	XII MIPA 3	25	21	46	44	1	0	1	0	46
4	XII MIPA 4	23	23	46	44	0	1	1	0	46
5	XII MIPA 5	27	17	44	40	3	1	0	0	44
6	XII MIPA 6	23	20	43	43	0	0	0	0	43
7	XII MIPA 7	20	27	47	46	1	0	0	0	47
8	XII MIPA 8	22	21	43	43	0	0	0	0	43
9	XII MIPA 9	27	17	44	42	2	0	0	0	44
10	XII MIPA 10	17	22	39	37	2	0	0	0	39
Jumlah Mipa		238	204	442	420	14	3	5	0	442
11	XII IPS 1	17	16	33	31	2	0	0	0	33
12	XII IPS 2	13	19	32	32	0	0	0	0	32
12	XII IPS 3	18	6	24	24	0	0	0	0	24
Jumlah IPS		48	41	89	87	2	0	0	0	89
Jumlah Seluruh		286	245	531	507	16	3	5	0	531
No	Kelas	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Islam	Kristen	katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	X	244	153	397	370	20	4	1	1	396
2	XI	178	143	321	308	9	2	2	0	321
3	XII	286	245	531	507	16	3	5	0	531
Jumlah		708	541	1249	1185	45	9	8	1	1248

D. Batas wilayah SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan sekolah-sekolah yang termasuk di dalam wilayah tersebut:

1. Kecamatan Tanjung Karang Pusat

- a. SMP Negeri 9 Bandar Lampung
- b. SMP Negeri 25 Bandar Lampung
- c. SMP Fransiskus Bandar Lampung
- d. SMP Kartika II-2 Bandar Lampung
- e. SMP Islam Nazhirah

f. SMP PGRI 1 Bandar Lampung

g. SMP PGRI 3 Bandar Lampung

h. SMP Perintis 1 dan 2 Bandar Lampung

i. SMP Pelita Bangsa

j. SMP Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

2. Kecamatan Tanjung Karang Barat

a. SMP Negeri 10 Bandar Lampung

b. SMP Negeri 7 Bandar Lampung

c. SMP Wiyatama Bandar Lampung

d. SMP IT AR Raihan Internasional

e. SMP 5 Oktober Bandar Lampung

f. SMP Budi Mulia Bandar Lampung

3. Kecamatan Enggal

a. SMP Negeri 4 Bandar Lampung

b. SMP Xaverius 2 Bandar Lampung



- c. SMP Utama 3 Bandar Lampung
- d. SMP Eka Karya Bandar Lampung

4. Kecamatan Kedaton

- a. SMP Negeri 34 Bandar Lampung
- b. SMP Negeri 8 Bandar Lampung
- c. SMP Kristen 5 Bandar Lampung
- d. SMP Surya Dharma Bandar Lampung
- e. SMP Al- Azhar 3 Bandar Lampung
- f. SMP Penyeimbang Bandar Lampung

5. Kecamatan Teluk Betung Selatan

- a. SMP Negeri 3 Bandar Lampung
- b. SMP Negeri 6 Bandar Lampung
- c. SMP Negeri 11 Bandar Lampung
- d. SMP Xaverius 1 Bandar Lampung

6. Kecamatan Teluk Betung Utara

- a. SMP Negeri 16 Bandar Lampung
- b. SMP Negeri 18 Bandar Lampung
- c. SMP Immanuel Bandar Lampung
- d. SMP Advent Bandar Lampung
- e. SMP Negeri 17 Bandar Lampung
- f. SMP Guna Dharma Bandar Lampung
- g. Taman Dewasa (SMP) Tamansiswa

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Penetapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pemahaman system pendidikan. Perbaikan system pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas.

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya

Sejak tahun 2017, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi dalam system penerimaan peserta

didik baru. Target nya bukan hanya pemerataan akses layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan. Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Menurut Mendikbud sendiri, kebijakan zonasi diambil sebagai respon atas terjadinya “kasta” dalam system pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan sistem zonasi ditetapkan pemerintah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan status sekolah favorit atau bukan. Setiap sekolah diharuskan menerima minimal 90 persen siswa dari area sekitarnya, dan hanya 5 persen kuota untuk calon siswa dari luar zona.

Pada praktiknya, dengan zonasi siswa diarahkan memilih sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Sekolah bagus juga “dipaksa” menerima siswa dengan prestasi rendah, yang tinggal di dekat lokasinya untuk mengurangi beban biaya transportasi dan menciptakan keadilan akses pendidikan.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada prinsip ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya di peruntukan untuk golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai yaitu hak asasi, agama, kultural dan kemajemukan. Terlihat bahwa pendidikan sangat menentang terhadap hal yang berhubungan dengan membedakan atau mengotak-kotakan

masyarakat. Baik suku manapun, agama apapun, warna kulit apapun berhak memperoleh pendidikan dengan baik.

Pendidikan Indonesia sekarang terlihat seperti mengikuti kapitalisme kehidupan, dimana mereka yang memiliki modal yang lebih baik akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Harusnya kita harus belajar dari konsep ekonomi dasar bahwa pendidikan harus dapat dikelola dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya pendidikan yang bermutu tidak selalu harus berbiaya mahal. Setiap manusia memiliki hak-hak yang sama baik itu dari bidang menerima pendidikan, pengajaran, dll. Oleh sebab itu, setiap manusia mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama.

Keadilan harus menjadi pertimbangan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan atau keputusan yang diambil. Siapa yang berlaku adil, maka sesungguhnya ia telah berakhlak dengan salah satu akhlak Allah, *al-'Adl* (Yang Maha Adil). Begitupun dengan pendidikan, pendidikan dalam Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan-perbedaan diantara manusia dan harus menjunjung tinggi keadilan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terbilang kontroversial adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Yang didalamnya turut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Sebenarnya, system zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018. Tujuan dari system zonasi ini adalah agar anak-anak dapat bersekolah di tempat yang dekat dari domisilinya serta pemerataan agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit, sehingga anak-anak yang dianggap sebagai anak pintar hanya akan masuk sekolah favorit saja. Anak yang satu wilayah dengan sekolah lebih besar kemungkinan akan diterima di sekolah tersebut. Zonasi tidak hanya untuk pemerataan sekolah favorit saja, melainkan juga sarana dan prasarana sekolah dan penyebaran guru yang berkualitas, apabila guru tersebut memiliki potensi ia akan berkembang di sekolah dengan anak-anak yang berbeda dari biasanya di SMAN 2 Bandar Lampung.

Namun, terlepas dari itu semua banyak kalangan yang merasa dirugikan, mulai dari siswa yang mumpuni namun tidak bisa bersekolah di sekolah favorit seperti SMAN 2 Bandar Lampung. Serta guru-guru yang juga merasakan dampak dimana mereka harus ekstra mengajar anak-anak yang berbeda dari biasanya dan menerima bahwa mereka juga harus merasakan lukisan dengan guru-guru lain dari seluruh SMA Negeri di Bandar Lampung. Dan terakhir sekolah juga harus lebih

bekerja keras mendisiplinkan anak-anak yang mayoritas diterima melalui sistem zonasi agar kualitas SMAN 2 Bandar Lampung tidak menurun.

B. Tujuan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendikbud No. 14 Tahun 2018

Adil terdiri dari dua suku kata, tapi berjuta kesulitan untuk melaksanakannya. Bahkan penulis katakan bahwa hampir tidak ada manusia yang bisa melaksanakan adil dengan sempurna. Entah kenapa adil sangat sulit dilakukan.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan ciri atau kunci ajaran Islam. Setiap kaum muslimin memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Hak disini dimaknai bahwa setiap muslim akan mendapatkan keadilan hukum yang sama. Dengan keadilan, orang akan merasa aman dan nyaman.

Keadilan ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik Al-Qur'an maupun hadits. Keadilan kehidupan sosial, politik, keamanan dan lainnya. Banyak di dalam sendi kehidupan kita harus meletakkan keadilan seperti pernikahan, perceraian, rujuk, menetapkan putusan dan lain-lain.

Tidak bisa dibayangkan jika didunia ini tanpa ada keadilan. Semua manusia akan saling curiga dimana tidak ada orang yang bisa dipercaya. Akhirnya sebuah kekacauan akan terjadi. Peran seorang pemimpin dalam memimpin kepemimpinannya akan diuji apakah pemimpin itu adil atau tidak.

Contoh yang paling baik untuk berperilaku adil adalah pada diri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW selalu berbuat adil dan menegakkan keadilan kepada seluruh umatnya, dalam haditsnya beliau bersabda yang artinya :

“Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.”(HR. Bukhari)

Dari hadits ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak membedakan, walaupun anaknya sendiri apabila Fatimah tertangkap mencuri Nabi Muhammad SAW akan tetap memberikan sanksi yang tegas yaitu akan memotong tangannya.

Dan ketahuilah bahwa Allah ta’ala memerintahkan berbuat adil dan mengabarkan bahwa Ia mencintai orang-orang yang adil. Allah ta’ala berfirman yang artinya :”Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan baik”. (QS. An-Nahl : 90) “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil”. (QS. Al-Maidah :42) Adil adalah sikap tengah-tengah dalam segala sesuatu dan keadilan adalah karakter yang mengharuskan seseorang menjaga diri dari hilangnya kehormatannya.

Dalam system zonasi tahun 2018 masih belum merata di sekolah-sekolah sehingga masih banyak sekolah-sekolah yang dianggap favorit dimana anak-anaknya mumpuni dalam hal ekonomi. Kemudian banyak yang merasa minder akan bersekolah disana. Dan juga masih banyak anak-anak yang merasa tidak adanya keadilan untuk mereka yang bisa bersekolah di sekolah favorit yang mereka inginkan.. Kebijakan yang dianggap tidak lazim (tidak seperti biasanya) ini diambil Kemendikbud alasannya sebagai upaya menghilangkan pola pikir

kastanisasi dan favoritisme terhadap salah satu sekolah yang dikelola pemerintah. Selain itu, juga menjadi satu strategi pemerataan yang tidak hanya menyasar akses layanan pendidikan tetapi juga kualitas pendidikan.

Jadi menurut peneliti, sistem zonasi yang dilakukan pemerintah sesuai hanya saja harus disempurnakan kembali. Sebab keadilan dalam system zonasi ini membuat semua orang berhak mengamban pendidikan ditempat yang layak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penetapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sistem zonasi sendiri bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, dimana agar anak-anak dapat mengemban pendidikan disekolah yang terkenal dengan kualitasnya sehingga mereka bisa mengimbangi diri dan belajar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sistem zonasi dibuat agar semua peserta didik terlepas dari kondisi ekonomi, kelas sosial, dan prestasinya bisa bersekolah di sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah. Sudah semestinya siswa bebas dari beban waktu dan jarak menuju sekolah yang bisa membenani secara psikologis. Begitupula dengan sekolah, SMA Negeri 2 Bandar Lampung sendiri harus ekstra mengajarkan anak-anak dan tidak membanding-bandingkan dengan non zonasi agar mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan sekolah agar kualitas sekolah tidak menurun.
2. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam mengenai sistem zonasi yang dilakukan pemerintah sesuai hanya saja harus disempurnakan kembali. Sebab keadilan dalam sistem zonasi ini membuat semua orang berhak mendapat pendidikan ditempat yang layak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan zonasi dalam PPDB yang progresif dan berani ini baru berjalan tiga tahun. Sambil melakukan perbaikan di segala aspek, akan lebih baik jika kita mengevaluasi sistem baru ini tahun depan. Sebab, peserta didik lulusan SMP/SMA/SMK dengan sistem zonasi baru akan lulus pada 2020.
2. Sistem PPDB merupakan layanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memasukkan putra-putrinya ke sekolah. Oleh karena itu, orang tua yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam PPDB seharusnya didengar dan diberikan kesempatan untuk menyuarakan sistem pendidikan apa yang mereka inginkan.
3. Karena mempunyai keinginan tetapi dibatasi oleh aturan, siswa berpikir, buat apa belajar sungguh-sungguh kalau kemudian tidak bisa mendaftar di sekolah favorite. Maka pemerintah harus bersikap, berikanlah sekian persen kepada anak diluar zona untuk bisa berkompetisi. Kalau ada peluang, kemudian bisa mencoba. Kalau seandainya kalah, dia bisa menyadari bahwa sudah berjuang dan kalah. Kalau belum berjuang sudah dibatasi, artinya itu disingkirkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu., dkk. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Akmansyah. *Pendidikan Akidah Bagi Anak Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2014.
- Daryanto & Rachmawati, *Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik*. Yogyakarta: Gava Media. 2015.
- Departemen Agama. *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*. t.tp: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2010.
- Junaidah. *Upaya Pengembangan Diri Peserta Didik*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan. 2016.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Khadowmi, Eka Reza . Skripsi: *"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta didik Baru Kabupaten Lampung Tengah"*. Bandar Lampung: UNILA. 2019).
- Masganti, *Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Perdana Publishing. 2012.
- Maunah, Binti . *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta,: Teras. 2009.
- Mudyahardjo, Redja . *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Munardji. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta. PT. Bina Ilmu, 2004.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Jakarta. 2013.
- Rachmat. *Kewarganegaraan 2*. Jakarta: Grasindo. 2004.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Bandung: Permana. 2006.

Sholihin, Bunyana . *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1990.

Soleh, Sofyan, dkk. *Matakuliah Filsafat Pendidikan Islam*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Tori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.1995.

Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sukardjo. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1996.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. *Manajemen Pendidikan*. Bandung:Alfabeta. 2009.

Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 . Yogyakarta: Bening. 2010.

Jurnal

Nasution, Khoiruddin. “*Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XIII No 1. 2016.

Perbawati, Candra. “*Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Presepektif Hukum Islam*”. Jurnal Al-‘Adalah, Vol XII No. 4. 2015.

Purwanti, Dian, dkk, “*efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan*”, Dinamika: Jurnal Ilmialh Ilmu Administrasi Negara, vol 5 no 4. 2018.

Yasin, Johan. *"hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga Negara dalam hukum positif Indonesia"*, Jurnal Syiar Hukum, vol 11 no. 2. 2009.

Online

<http://ademujhiyat.blogspot.com/2016/05/hak-dan-kewajiban-pemerintah-terhadap.html>, diakses 8 Agustus 2019, jam 10:17 wib

<http://yunitaikamujianti.web.unej.ac.id/2017/09/20/karakteristik-peserta-didik/> diakses 8 Agustus 2019, jam 10:45 wib

<http://zonazeruu.blogspot.com/2016/06/hak-dan-kewajiban-pemerintah-dan.html>, diakses pada 5 agustus 2019, jam 09:56 wib

<https://asysyariah.com/kewajiban-pemerintah/>, diakses 6 agustus 2019 jam 10:12 wib

<https://blog.kartunmania.com/2018/02/passing-grade-hasil-ppdb-smp-sma-dan-smk-kota-bandar-lampung-2017/#tabs-4716-0-1>

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb> , diakses pada 31 juli 2019, jam 10:46 wib

<https://www.draftgorenh.com/hak-dan-kewajiban-pemerintah-daerah-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 5 agustus 2019 jam 10:31 wib

<https://www.smp-muh5bdl.sch.id/2018/05/informasi-ppdb-sma-kota-bandar-lampung.html>

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999

Wawancara

Pak M. Kholi M.Pd., selaku Sekretaris PPDB 2018/2019

Tasya Amalia selaku Siswa kelas XII di SMA 2 Bandar Lampung

Nadia Azzahra selaku Siswa kelas XII di SMA 2 Bandar Lampung